

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2026
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Mantup Nomor 29 Kode Pos 62281
Telp (0322) 322369 Fax 322369 Pos-el tikung@lamongan.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui manajemen risiko, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, menilai tingkat kemungkinan serta dampaknya, dan menetapkan langkah pengendalian yang proporsional. Dalam konteks tersebut, penilaian risiko bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen manajerial untuk menjaga agar proses pemerintahan tetap berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mempunyai kedudukan strategis sebagai simpul koordinasi wilayah, fasilitator penyelenggaraan pemerintahan desa, penghubung program lintas perangkat daerah, dan garda terdepan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dengan fungsi tersebut, kualitas tata kelola kecamatan tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses internal, tetapi juga oleh kemampuan kecamatan dalam membangun kolaborasi, menjaga mutu layanan, mengelola kinerja secara terukur, serta memastikan setiap risiko signifikan telah diantisipasi sejak awal.

Dalam pelaksanaan penilaian risiko Tahun 2026, fokus penguatan di Kecamatan Tikung diarahkan pada empat area strategis, yaitu Nilai Sinergitas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan, dan Nilai Manajemen Risiko. Keempat area tersebut dipilih karena paling mencerminkan kualitas tata kelola kecamatan secara menyeluruh: sinergitas menunjukkan kualitas kolaborasi dan koordinasi, IKM menggambarkan persepsi masyarakat atas mutu layanan, SAKIP mengukur akuntabilitas kinerja organisasi, sedangkan manajemen risiko memastikan seluruh proses perbaikan tersebut berjalan dengan pendekatan yang antisipatif.

Keempat nilai tersebut sesungguhnya saling berkaitan erat. Sinergitas yang baik akan memperkuat pelaksanaan program, memperjelas peran masing-masing pihak, dan menurunkan risiko tumpang tindih maupun

keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Pelayanan publik yang tertata, responsif, dan konsisten akan berkontribusi langsung pada peningkatan nilai IKM. Perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang baik akan memperkuat nilai SAKIP Kecamatan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang memadai akan menjadi kerangka pengendalian agar perbaikan pada tiga area lainnya tidak bersifat insidental, melainkan berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik.

Lingkungan strategis yang terus berubah, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan, kebutuhan penyelarasan data dan kinerja lintas unit, serta tuntutan akuntabilitas dari pemerintah daerah menegaskan pentingnya penilaian risiko yang lebih fokus dan mendalam. Tanpa adanya penilaian risiko yang memadai, kelemahan koordinasi, kualitas data yang belum konsisten, rendahnya tindak lanjut survei layanan, maupun lemahnya monitoring rencana pengendalian berpotensi menghambat pencapaian target kinerja kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecamatan Tikung Tahun 2026 disusun sebagai dokumen yang memotret kondisi pengendalian saat ini, mengidentifikasi risiko prioritas, menganalisis tingkat risikonya, dan merumuskan rencana tindak pengendalian yang realistis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi pimpinan dan unit pelaksana dalam meningkatkan nilai Sinergitas, IKM, SAKIP Kecamatan, dan Manajemen Risiko secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi Pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)

4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

BAB III
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2026 s.d 2029 meliputi :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan- kemungkinan atau kejadian - kejadian yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama. Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
 Kertas Kerja Strategis OPD Kecamatan Tikung

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD	Kecamatan Tikung									
Tahun Penilaian	2026									
Periode yang Dinilai	2026									
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan									
Urusan Pemerintahan	Lainnya									
OPD yang dinilai	Kecamatan Tikung									
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan									
Sasaran	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik									
No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena

			(siapa (who) melakukan apa (what))							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan	-	RSO.26.99.323.01	Camat Tikung	Sarana dan Prasarana Kurang Mendukung (Alat Cetak KTP Rusak)	Eksternal	UC	Nilai IKM Rendah	Kecamatan Tikung dan Masyarakat
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Pengiriman LKJIP Terlambat	-	RSO.26.99.323.02	Camat Tikung	Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala Terhadap Pencapaian Kinerja, SDM yang Terbatas: Staf kurang jumlahnya untuk menyusun laporan kinerja dalam waktu yang ditentukan.	Internal	C	Nilai SAKIP Kurang Maksimal	Kecamatan Tikung
3	Nilai Manajemen Risiko	Pelaporan tidak tepat waktu	-	RSO.26.99.323.03	Camat Tikung	Kurangnya SDM yang memadai dan Beban Kerja	Internal	C	Nilai manajemen risiko tidak maksimal	Kecamatan Tikung

Tabel 2
Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama OPD		Kecamatan Tikung											
Tahun Penilaian		2026											
Periode yang Dinilai		2026											
Tujuan Strategis													
Sasaran strategis OPD													
Urusan Pemerintahan		Lainnya											
OPD yang Dinilai		Kecamatan Tikung											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	Pelaksanaan	Keterlambatan penyusunan/penetapan dokumen	-	ROO.26.99.323.01	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal, ketidakpatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan.	Internal	C	Akuntabilitas kinerja daerah menurun.	Kecamatan Tikung	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pembayaran TPP ASN terlambat	-	ROO.26.99.323.02	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	BPKAD belum memberikan rekomendasi pencairan TPP dan belum	Internal	C	Menimbulkan ketidakpastian finansial ASN dan Menurunkan	tan Tikung	

								lengkapnya dokumen untuk pengajuan TPP dari kecamatan, Gangguan teknis pada sistem pengelolaan			motivasi dan kinerja ASN	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kualitas Bahan/Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	-	ROO.2 6.99.3 23.03	Kasubag umum dan kepegawaian	penyedia menggunakan bahan di bawah standar. Spesifikasi tidak jelas atau kurang lengkap	Eksternal	UC	Kualitas pakaian dinas rendah dan tidak nyaman digunakan, penolakan hasil pengadaan potensi sengketa kontrak.	Kecamatan Tikung
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan proyek/pengadaan	-	ROO.2 6.99.3 23.04	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Masalah logistik, komponen yang dipesan tidak sesuai spesifikasi,	Eksternal	UC	Proyek instalasi molor dari jadwal dan fungsi kantor terganggu lebih lama.	Kecamatan Tikung
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Rencana Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan	-	ROO.2 6.99.3 23.05	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya koordinasi antar bidang	Internal	C	Kebutuhan tidak terpenuhi	Kecamatan Tikung
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan Pembayaran Tagihan	-	ROO.2 6.99.3 23.06	Kasubag umum dan kepegawaian	Kelalaian staf, lupa jadwal, sistem administrasi lambat, atau masalah pencairan dana.	Internal	C	Layanan terputus (telepon, internet, listrik), mengganggu komunikasi dan pekerjaan,	Kecamatan Tikung
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan	-	ROO.2 6.99.3 23.07	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya koordinasi antara bagian pengelola kendaraan dengan bagian keuangan.	Internal	C	Pengenaan denda administrasi atau sanksi hukum. - Kendaraan dinas tidak dapat digunakan secara legal di jalan raya (STNK/pajak mati)	Kecamatan Tikung
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Ketidaksiuaian kebijakan	-	ROO.2 6.99.3 23.08	Kasi Pemerintahan	Perbedaan pemahaman terhadap regulasi atau adanya perubahan kebijakan	Eksternal	UC	Program daerah bertentangan dengan kebijakan vertikal, hambatan hukum, atau	Pemerintah

								mendadak dari pusat/daerah.			hasil kegiatan menjadi tidak sah.	
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Efektifitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Pelaksanaan	Terlambatnya penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	-	ROO.2 6.99.3 23.09	Kasi Pelayanan Publik	Berkas permohonan tidak lengkap, gangguan jaringan internet, dan gangguan sistem aplikasi	Eksternal	UC	Munculnya keluhan dan pegaduan	Kecamatan Tikung dan Masyarakat
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan	Usulan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat	-	ROO.2 6.99.3 23.10	Kasi PPM	Partisipasi masyarakat rendah, data kebutuhan tidak akurat, dan kurangnya koordinasi desa - kecamatan	Eksternal	UC	Program pembangunan tidak tepat sasaran, ketidakpuasan masyarakat dan pemborosan anggaran	Kecamatan Tikung dan Masyarakat
11	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Pelaksanaan	Peran lembaga masyarakat kurang optimal	-	ROO.2 6.99.3 23.11	Kasi PPM	Kurangnya pembinaan dan pendampingan, keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat	Eksternal	UC	Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal dan program pembangunan kurang berkelanjutan	Masyarakat
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan	Tawuran	-	ROO.2 6.99.3 23.12	Kasi Trantibum	dendam dan merasa lebih kuat	Eksternal	UC	Lingkungan tidak aman, kerusakan sarana prasarana umum	Masyarakat
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah	Pelaksanaan	Administrasi pemerintahan desa belum tertib	-	ROO.2 6.99.3 23.13	Kasi Pemerintahan	Kurangnya memahami administrasi dan pendampingan teknis	Internal	C	Pelayanan Publik terhambat, adanya temuan pemeriksaan atau audit	Kecamatan Tikung dan Masyarakat

C. HASIL ANALISIS RESIKO

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian risiko (RTP).

Tabel 3
Hasil Analisis Resiko Kecamatan Tikung

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan							
Tahun 2026							
Penilaian							
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Kecamatan Tikung	Pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan	RSO.26.99.323.01	9	Camat Tikung	Sarana dan Prasarana Kurang Mendukung (Alat Cetak KTP Rusak)	Nilai IKM Rendah
2	Kecamatan Tikung	Pengiriman LKJIP Terlambat	RSO.26.99.323.02	9	Camat Tikung	Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Berkala Terhadap Pencapaian Kinerja, SDM yang Terbatas: Staf kurang jumlahnya untuk menyusun laporan kinerja dalam waktu yang ditentukan.	Nilai SAKIP Kurang Maksimal
3	Kecamatan Tikung	Pelaporan tidak tepat waktu	RSO.26.99.323.03	11	Camat Tikung	Kurangnya SDM yang memadai dan Beban Kerja	Nilai manajemen risiko tidak maksimal
Risiko Operasional OPD							
1	Kecamatan Tikung	Keterlambatan penyusunan/penetapan dokumen	ROO.26.99.323.01	9	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Kurangnya koordinasi antar unit kerja internal, ketidakpatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan.	Akuntabilitas kinerja daerah menurun.
2	Kecamatan Tikung	Pembayaran TPP ASN terlambat	ROO.26.99.323.02	9	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	BPKAD belum memberikan rekomendasi pencairan TPP dan belum lengkapnya dokumen untuk pengajuan TPP dari kecamatan, Gangguan teknis pada sistem pengelolaan	Menimbulkan ketidakpastian finansial ASN dan Menurunkan motivasi dan kinerja ASN
3	Kecamatan Tikung	Kualitas Bahan/Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO.26.99.323.03	11	Kasubag umum dan kepegawaian	penyedia menggunakan bahan di bawah standar. Spesifikasi tidak jelas atau kurang lengkap	Kualitas pakaian dinas rendah dan tidak nyaman digunakan, penolakan hasil pengadaan potensi sengketa kontrak.
4	Kecamatan Tikung	Keterlambatan proyek/pengadaan	ROO.26.99.323.04	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Masalah logistik, komponen yang dipesan tidak sesuai spesifikasi,	Proyek instalasi molor dari jadwal dan fungsi kantor terganggu lebih lama.
5	Kecamatan Tikung	Rencana Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.99.323.05	10	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya koordinasi antar bidang	Kebutuhan tidak terpenuhi
6	Kecamatan Tikung	Keterlambatan Pembayaran Tagihan	ROO.26.99.323.06	9	Kasubag umum dan kepegawaian	Kelalaian staf, lupa jadwal, sistem administrasi lambat, atau masalah pencairan dana.	Layanan terputus (telepon, internet, listrik), mengganggu komunikasi dan pekerjaan,

7	Kecamatan Tikung	Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan	ROO.26.99.323.07	10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya koordinasi antara bagian pengelola kendaraan dengan bagian keuangan.	Pengenaan denda administrasi atau sanksi hukum. - Kendaraan dinas tidak dapat digunakan secara legal di jalan raya (STNK/pajak mati)
8	Kecamatan Tikung	Ketidaksesuaian kebijakan	ROO.26.99.323.08	10	Kasi Pemerintahan	Perbedaan pemahaman terhadap regulasi atau adanya perubahan kebijakan mendadak dari pusat/daerah.	Program daerah bertentangan dengan kebijakan vertikal, hambatan hukum, atau hasil kegiatan menjadi tidak sah.
9	Kecamatan Tikung	Terlambatnya penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	ROO.26.99.323.09	9	Kasi Pelayanan Publik	Berkas permohonan tidak lengkap, gangguan jaringan internet, dan gangguan sistem aplikasi	Munculnya keluhan dan pegaduan
10	Kecamatan Tikung	Usulan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat	ROO.26.99.323.10	7	Kasi PPM	Partisipasi masyarakat rendah, data kebutuhan tidak akurat, dan kurangnya koordinasi desa - kecamatan	Program pembangunan tidak tepat sasaran, ketidakpuasan masyarakat dan pemborosan anggaran
11	Kecamatan Tikung	Peran lembaga masyarakat kurang optimal	ROO.26.99.323.11	10	Kasi PPM	Kurangnya pembinaan dan pendampingan, keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan maksimal dan program pembangunan kurang berkelanjutan
12	Kecamatan Tikung	Tawuran	ROO.26.99.323.12	9	Kasi Trantibum	dendam dan merasa lebih kuat	Lingkungan tidak aman, kerusakan sarana prasarana umum
13	Kecamatan Tikung	Administrasi pemerintahan desa belum tertib	ROO.26.99.323.13	10	Kasi Pemerintahan	Kurangnya memahami administrasi dan pendampingan teknis	Pelayanan Publik terhambat, adanya temuan pemeriksaan atau audit

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN dan YANG MASIH DIBUTUHKAN

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Tikung dalam pelaksanaan pengendalian dan sebagai langkah startegis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian

yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4 Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan								
Urusan Pemerintahan	Lainnya								
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:									
1	Pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan	RSO.26.99.323.01	SOP pelayanan publik, Kotak saran / survei kepuasan masyarakat (SKM)	Monitoring kepuasan belum rutin dianalisis, Respons pengaduan lambat.	Diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik dan Dukcapil Lamongan serta Monitoring dan evaluasi berkala	Camat Tikung	Desember 2026	sudah dilaksanakan	-
2	Pengiriman LKJIP Terlambat	RSO.26.99.323.02	Jadwal penyusunan LKJIP	Koordinasi data antar seksi lemah Tidak ada reminder timeline	Membuat timeline rinci + checklist Monitoring mingguan progres	Camat Tikung	Februari 2026	Sudah dilaksanakan di bulan Februari 2026	-
3	Pelaporan tidak tepat waktu	RSO.26.99.323.03	Jadwal pelaporan rutin dan Format laporan baku	Disiplin pelaporan rendah	Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu	Camat Tikung	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:									
1	Keterlambatan penyusunan/penetapan dokumen	ROO.26.99.323.01	SOP penyusunan dokumen	Kurang koordinasi dan Beban kerja tidak merata	Menyusun jadwal terperinci dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
2	Pembayaran TPP ASN terlambat	ROO.26.99.323.02	Jadwal pembayaran bulanan Sistem pengajuan TPP	Verifikasi data lambat	Penyelesaian administrasi secara proaktif dan tepat waktu dan Evaluasi berkala terhadap proses transisi sistem untuk mencegah hambatan berulang.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
3	Kualitas Bahan/Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO.26.99.323.03	Spesifikasi teknis dalam kontrak dan	Pengawasan kurang ketat dan Tidak ada	melakukan uji sampel bahan, melakukan pengawasan mutu berkala.	Kasubag umum dan kepegawaian	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-

			Pemeriksaan barang	uji kualitas mendalam					
4	Keterlambatan proyek/pengadaan	ROO.26.99.323.04	Jadwal pelaksanaan proyek dan Kontrak kerja	Pengawasan lapangan kurang dan Penyedia tidak disiplin	verifikasi spesifikasi komponen sebelum pembelian, dan pemantauan secara berkala.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
5	Rencana Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.99.323.05	RKA dan perencanaan tahunan, Usulan dari unit kerja	Analisis kebutuhan kurang matang dan Tidak berbasis data	Penyusunan berbasis kebutuhan riil, Konsultasi lintas unit Review perencanaan	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
6	Keterlambatan Pembayaran Tagihan	ROO.26.99.323.06	Sistem administrasi keuangan dan Prosedur pembayaran	Verifikasi dokumen lambat dan Penumpukan tagihan	Membuat jadwal pembayaran rutin. Menggunakan sistem pembayaran otomatis (autodebet). Penugasan khusus untuk monitoring tagihan.	Kasubag umum dan kepegawaian	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
7	Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan	ROO.26.99.323.07	Jadwal pembayaran pajak dan Pencatatan aset kendaraan	Kurang monitoring jatuh tempo dan Data tidak ter-update	Membuat sistem notifikasi atau pengingat otomatis untuk jatuh tempo pajak.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
8	Ketidaksesuaian kebijakan	ROO.26.99.323.08	Review kebijakan dan Harmonisasi regulasi	Kurang koordinasi antar unit dan Tidak update regulasi terbaru	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai regulasi terbaru, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk klarifikasi kebijakan.	Kasi Pemerintahan	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
9	Terlambatnya penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	ROO.26.99.323.09	SOP pelayanan perizinan dan Sistem pelayanan terpadu	Proses berbelit	Checklist kelengkapan berkas	Kasi Pelayanan Publik	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
10	Usulan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat	ROO.26.99.323.10	Musrenbang	Partisipasi masyarakat rendah	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan koordinasi intensif dengan pemerintah desa /kelurahan	Kasi PPM	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
11	Peran lembaga masyarakat kurang optimal	ROO.26.99.323.11	Pembinaan lembaga masyarakat dan Program pemberdayaan	Minimnya Koordinasi	Pembinaan dan pelatihan rutin, pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta Evaluasi peran lembaga	Kasi PPM	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-
12	Tawuran	ROO.26.99.323.12	Patroli keamanan dan Sosialisasi	Pengawasan lingkungan kurang dan Faktor	Kolaborasi dengan aparat keamanan, Pembinaan pemuda dan Kegiatan positif masyarakat	Kasi Trantibum	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	-

			kepada masyarakat	sosial tidak tertangani					
13	Administrasi pemerintahan desa belum tertib	ROO.26.99.323.13	Pedoman administrasi desa dan Pembinaan dari kecamatan	SDM kurang kompeten dan Tidak disiplin administrasi	Pelatihan administrasi desa, Pendampingan intensif, dan Digitalisasi administrasi	Kasi Pemerintahan	Desember 2026	Sedang dilaksanakan	

BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang di butuhkan agar pihak pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5
Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian 2026
Tujuan Strategis Pemda Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan
Urusan Pemerintahan Lainnya
Dinas Terkait Kecamatan Tikung

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:								
1	Diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik dan Dukcapil Lamongan serta Monitoring dan evaluasi berkala	Sosialisasi, Website, Media Sosial, Banner Informasi	Camat Tikung	Petugas Pelayanan Publik dan Masyarakat di Kecamatan Tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
2	Membuat timeline rinci + checklist Monitoring mingguan progres	Rapat koordinasi, WhatsApp Group, Laporan progres	Camat Tikung	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan beserta staf	Februari 2026	Sudah dilaksanakan	=	-
3	Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu	Rapat evaluasi, dan Laporan berkala	Camat Tikung	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan beserta staf	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:								
1	Menyusun jadwal terperinci dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan	Rapat koordinasi, Kalender kerja, Grup WA	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Pegawai Kecamatan Tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
2	Penyelesaian administrasi secara proaktif dan tepat waktu dan Evaluasi berkala terhadap proses transisi	Rapat internal	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Pegawai Kecamatan Tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-

	sistem untuk mencegah hambatan berulang.							
3	melakukan uji sampel bahan, melakukan pengawasan mutu berkala.	Laporan hasil uji, berita acara, dokumentasi	Kasubag umum dan kepegawaian	PPK, PPTK dan Bendahara	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
4	verifikasi spesifikasi komponen sebelum pembelian, dan pemantauan secara berkala.	Dokumen pengadaan, checklist, berita acara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPK, PPTK dan Bendahara	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
5	Penyusunan berbasis kebutuhan riil, Konsultasi lintas unit Review perencanaan	Forum perencanaan, rapat lintas unit, dokumen RKA	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	PPK, PPTK dan Bendahara	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
6	Membuat jadwal pembayaran rutin. Menggunakan sistem pembayaran otomatis (autodebet). Penugasan khusus untuk monitoring tagihan.	reminder laporan secara berkala	Kasubag umum dan kepegawaian	Bendahara	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
7	Membuat sistem notifikasi atau pengingat otomatis untuk jatuh tempo pajak.	Sistem notifikasi, kalender digital, WA	Kasubag umum dan kepegawaian	seluruh pegawai di kecamatan tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
8	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai regulasi terbaru, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk klarifikasi kebijakan.	Rapat Koordinasi secara berkala	Kasi Pemerintahan	seluruh pegawai di kecamatan tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
9	Checklist kelengkapan berkas	Checklist manual/digital, SOP	Kasi Pelayanan Publik	Pegawai Pelayanan Publik Kecamatan Tikung	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
10	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan koordinasi intensif dengan	Forum musrenbang, undangan resmi	Kasi PPM	Pemerintah Desa & Masyarakat	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-

	pemerintah desa /kelurahan							
11	Pembinaan dan pelatihan rutin, pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta Evaluasi peran lembaga	Pelatihan, pendampingan, rapat evaluasi	Kasi PPM	Lembaga Masyarakat	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
12	Kolaborasi dengan aparat keamanan, Pembinaan pemuda dan Kegiatan positif masyarakat	Sosialisasi, patroli, forum masyarakat	Kasi Trantibum	Masyarakat & Pemuda	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-
13	Pelatihan administrasi desa, Pendampingan intensif, dan Digitalisasi administrasi	Bimtek, aplikasi desa, pendampingan	Kasi Pemerintahan	Pemerintah Desa	Januari - Desember 2026	Sedang dilaksanakan	=	-

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6
Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2026						
Tujuan Strategis Pemda	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan						
Urusan Pemerintahan	Lainnya						
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:							
1	Diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik dan Dukcapil Lamongan serta Monitoring dan evaluasi berkala	Monitoring lapangan, survei kepuasan, laporan berkala	Camat Tikung	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-
2	Membuat timeline rinci + checklist Monitoring mingguan progres	Checklist progres, rapat mingguan, laporan monitoring	Camat Tikung	Januari - Februari 2026	Februari 2026	-	-
3	Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu	Rapat evaluasi, laporan kinerja, dashboard	Camat Tikung	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:							
1	Menyusun jadwal terperinci dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan	Monitoring jadwal, checklist kegiatan, rapat evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-
2	Penyelesaian administrasi secara proaktif dan tepat waktu dan Evaluasi berkala terhadap proses transisi sistem untuk mencegah hambatan berulang.	Audit administrasi, evaluasi sistem, laporan berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-
3	melakukan uji sampel bahan, melakukan pengawasan mutu berkala.	Uji kualitas, inspeksi lapangan, berita acara	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-
4	verifikasi spesifikasi komponen sebelum pembelian, dan pemantauan secara berkala.	Pemeriksaan dokumen, checklist, monitoring pengadaan	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-	-

5	Penyusunan berbasis kebutuhan riil, Konsultasi lintas unit Review perencanaan	Review dokumen perencanaan, rapat koordinasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
6	Membuat jadwal pembayaran rutin. Menggunakan sistem pembayaran otomatis (autodebet). Penugasan khusus untuk monitoring tagihan.	Monitoring laporan keuangan, kontrol kas, rekonsiliasi	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
7	Membuat sistem notifikasi atau pengingat otomatis untuk jatuh tempo pajak.	Monitoring sistem notifikasi, pengecekan jatuh tempo	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
8	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai regulasi terbaru, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk klarifikasi kebijakan.	Evaluasi kegiatan bimtek, absensi peserta, laporan	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
9	Checklist kelengkapan berkas	Pemeriksaan berkas, audit pelayanan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
10	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan koordinasi intensif dengan pemerintah desa /kelurahan	Monitoring kegiatan musrenbang, laporan partisipasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2026	Februari 2026	=	-
11	Pembinaan dan pelatihan rutin, pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta Evaluasi peran lembaga	Evaluasi kegiatan, laporan pembinaan, monitoring lapangan	Kasi PPM	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	=	-
12	Kolaborasi dengan aparat keamanan, Pembinaan pemuda dan Kegiatan positif masyarakat	Monitoring keamanan, patroli, laporan kejadian	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
13	Pelatihan administrasi desa, Pendampingan intensif, dan Digitalisasi administrasi	Evaluasi administrasi, monitoring aplikasi desa	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	=	-

BAB VI

PENUTUP

Laporan penilaian resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di Lingkungan Kantor Kecamatan Tikung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan telah melakukan analisis manajemen risiko dari setiap kegiatan yang ada per tribulan. Berdasarkan hasil analisa manajemen risiko dari kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Tikung terdapat kemungkinan resiko hampir/pasti terjadi minimal sekali setiap satu tahun dengan penilaian risiko dari sisi tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko yaitu dampak rendah dan sedang dimana tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan. Adapun potensi resiko terkait dengan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor kondisi keadaan masyarakat.

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusun menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Tikung.



CAMAT TIKUNG

SUJIRMAN SHOLEH, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
19720909 200112 1 002